

## SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF CREDIT ACCESS IN MICRO ENTERPRISES HOUSEHOLD OF EAST JAVA DURING NEW NORMAL ERA

Christiyu Natalia\*<sup>1</sup>

FX Gugus Febri Putranto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, Indonesia

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kota Batu, Indonesia

### ABSTRACT

*The lack of micro-enterprises household in East Java that access business credit can affect the integration of MSMEs in the Global Value Chain (GVC) and exports acceleration in new normal era. This study aims to analyze the socio-economic determinants of micro-enterprise household credit access in East Java, and specific to each Bakorwil. Multinomial logistic regression analysis on the Susenas March 2021 and Potensi Desa 2021 found that there were differences in socio-economic characteristics in each Bakorwil. Important issues in accessing KUR/KUBE/KUB are poverty status, social protection programs, entrepreneur status, and internet use. Regional-based policies can be applied for business development and encourage integration into GVC by considering the socio-economic characteristics of each Bakorwil.*

**Keywords:** Business Credit Access; Micro Enterprises; GVC; Susenas; Multinomial Logistic Regression

### ARTICLE INFO

Tanggal Masuk: 17 Juli 2022

Tanggal Revisi: 19 September 2022

Tanggal Diterima: 20 September 2022

Tersedia Online: 30 September 2022

\*Korespondensi:

Christiyu Natalia

E-mail:

[christiyu@bps.go.id](mailto:christiyu@bps.go.id)

### ABSTRAK

*Minimnya rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur yang mengakses kredit usaha dapat menghambat integrasi UMKM dalam Global Value Chain (GVC) dan upaya akselerasi ekspor di era normal baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan sosial ekonomi akses kredit rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur tahun 2021, serta spesifik pada setiap Bakorwil. Analisis regresi logistik multinomial pada Susenas Maret 2021 dan Potensi Desa 2021 menemukan bahwa terdapat perbedaan karakteristik sosial ekonomi di setiap Bakorwil. Isu penting dalam akses KUR/KUBE/KUB adalah status kemiskinan, program perlindungan sosial, status pengusaha, dan penggunaan internet. Kebijakan berbasis kewilayahan dapat diterapkan untuk pengembangan usaha melalui akses KUR/KUBE/KUB dan mendorong integrasi pada GVC berdasarkan karakteristik sosio-ekonomi Bakorwil.*

**Kata Kunci:** Akses Kredit Usaha; Usaha Mikro; GVC; Susenas; Regresi Logistik Multinomial

JEL : D25; D22; D14

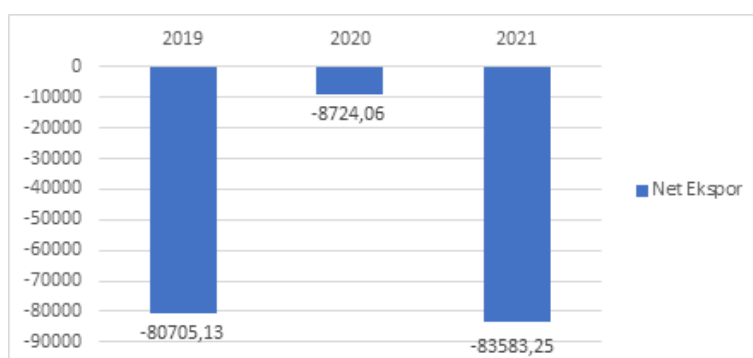
### Pendahuluan

Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi perekonomian sebesar 14,48 persen terhadap keseluruhan perekonomian nasional, menempati posisi kedua kontributor perekonomian terbesar di Indonesia sesudah DKI Jakarta pada tahun 2021 (BPS, 2022). Besarnya kontribusi Jawa

Timur terhadap perekonomian nasional, salah satunya ditopang oleh kegiatan ekspor pada sisi penggunaan PDRB di Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 13.82 persen (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022c). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekspor merupakan salah satu andalan Jawa Timur dalam mengakselerasi laju pertumbuhan perekonomian di wilayahnya.

Pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 terjadi, nilai total ekspor Jawa Timur sempat mengalami penurunan, namun telah mengalami peningkatan kembali di tahun 2021, dengan nilai total ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022c). Kondisi ini mengindikasikan adanya pemulihan perekonomian pada tahun 2021 di era normal baru pandemi.

Sinyal positif dari peningkatan nilai ekspor di tahun 2021, dapat menjadi momentum akselerasi ekspor di Jawa Timur. Akselerasi ekspor tersebut diharapkan mampu mendorong pencapaian surplus neraca perdagangan Jawa Timur, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pada gambar 1 dapat dilihat tren nilai net ekspor Jawa Timur yang masih mengalami defisit dalam tiga tahun terakhir dalam kurun waktu 2019-2021.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

**Gambar 1: Net Ekspor Luar Negeri Provinsi Jawa Timur (dalam miliar rupiah), 2019-2021**

Dalam mendorong akselerasi ekspor, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM telah menetapkan tujuan selama tahun 2020-2024 terkait mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global, salah satunya melalui upaya mengintegrasikan UMKM dalam *Global Value Chain (GVC)* agar mampu terlibat langsung dalam rantai perdagangan internasional. Namun, keterlibatan UMKM di Indonesia dalam total ekspor negara masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Wignaraja (2013) menyatakan bahwa UMKM di Indonesia hanya berkontribusi sebesar 9,3 persen dari keseluruhan ekspor Indonesia. Nilai ini berada jauh di bawah rata-rata kontribusi ekspor UMKM di pada negara-negara ASEAN yang sebesar 20,3 persen.

Seiring dengan peningkatan jumlah UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun yang masih didominasi oleh usaha mikro, pada tahun 2019, kontribusi UMKM pada ekspor non migas di Indonesia telah mencapai 15,65 persen dengan rincian pada tabel 1 berikut. Usaha mikro memberikan kontribusi terkecil pada keseluruhan ekspor non migas di Indonesia yaitu sebesar 1,40 persen namun berkembang paling pesat dibandingkan kategori kecil dan menengah, dengan perkembangan sebesar 21,13 persen dalam kurun waktu satu tahun.

**Tabel 1: Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, 2018-2019**

Indikator	2018 (%)	2019 (%)	Perkembangan (%)
Unit Usaha			
Usaha Mikro	98,68	98,67	1,97
Usaha Kecil	1,22	1,22	1,99

Indikator	2018 (%)	2019 (%)	Perkembangan (%)
Usaha Menengah	0,09	0,10	7,85
Total Ekspor Non Migas			
Usaha Mikro	1,22	1,40	21,13
Usaha Kecil	2,30	2,60	19,76
Usaha Menengah	10,85	11,65	13,87

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Perkembangan pesat usaha mikro serta kontribusinya terhadap total ekspor non migas Indonesia merupakan sebuah potensi yang perlu dioptimalkan. Mendorong usaha mikro untuk meningkatkan produktivitas usaha akan mempermudah proses integrasi usaha mikro ke dalam *Global Value Chain (GVC)*.

Di Jawa Timur, pada tahun 2021, jumlah UMKM yang memasarkan produknya ke luar negeri hanya sebesar 1 persen dari seluruh UMKM yang ada di Jawa Timur ([Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, 2022](#)). Masih rendahnya partisipasi UMKM pada ekspor luar negeri, menjadikan UMKM di Jawa Timur, khususnya usaha mikro perlu didorong untuk dapat turut berperan pada pasar ekspor.

Untuk dapat terintegrasi dalam *Global Value Chain (GVC)*, UMKM memerlukan akses pada kredit usaha. [Wignaraja \(2013\)](#), menyatakan bahwa UMKM dengan akses kredit bank lebih mungkin untuk bergabung pada jaringan produksi dan *Global Value Chain (GVC)*. Namun, UMKM secara umum masih mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan karena masih bergantung pada dana yang dihasilkan secara internal atau sumber kredit informal yang lebih mahal. Hal ini juga sejalan dengan target RPJMN Kementerian Koperasi dan UMKM 2020-2024 untuk meningkatkan proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal. Selain itu, [Rodríguez-Pose et al. \(2021\)](#) menyatakan bahwa keterbatasan kredit bagi usaha mikro kecil dapat menjadi penghalang serius bagi peningkatan produktivitas perusahaan. Efek yang ditimbulkan pada usaha mikro dan kecil akan lebih besar dibandingkan dengan efek terhadap usaha berskala besar.

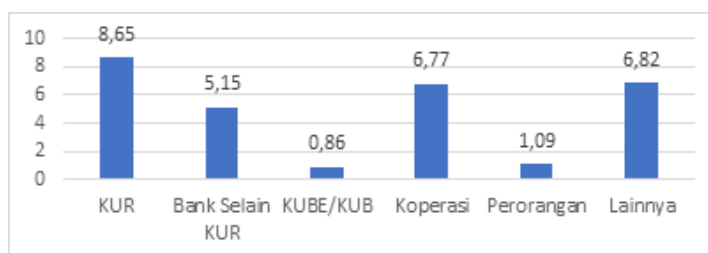
Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, upaya mendorong pertumbuhan UMKM tercantum dalam tujuan ke delapan di poin ketiga. Secara khusus pada poin ini dijelaskan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas-aktivitas yang bersifat produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan ([Kementerian PPN/Bappenas, 2020](#)). Dalam tujuan tersebut, telah tersampaikan bahwa akses terhadap layanan permodalan pada UMKM akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan UMKM.

Terdapat beberapa tantangan UMKM untuk terintegrasi dalam *Global Value Chain (GVC)*. Kesulitan dalam manajemen arus keuangan usaha merupakan salah satu kendala utama bagi UMKM. Lebih dari itu, usaha kecil menengah dengan pelaku individu, secara umum mengalami hambatan untuk menaikkan skala ekonominya yang disebabkan oleh kesulitan memperoleh input barang persediaan, peralatan, bahan baku, teknologi, akses keuangan serta tenaga kerja terampil ([Abe, 2016](#)). [Harvie and Charoenrat \(2016\)](#) juga mendeskripsikan beberapa faktor kunci dan karakteristik yang berasosiasi positif dengan kemampuan UKM untuk terintegrasi pada jaringan produksi adalah produktivitas tenaga kerja, stabilitas finansial dan besarnya kredit, dan kemampuan untuk mencapai standar internasional pada produk yang dihasilkan oleh UKM.

Usaha Mikro Kecil (UMK) terkait erat dengan permasalahan akses pembiayaan. [Esho and Verhoef \(2018\)](#) menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil (UMK) memegang peranan penting dalam perekonomian negara maju dan negara berkembang. Namun mereka mengalami kendala yang sangat berbeda dengan usaha besar. Kendala utama yang dialami adalah akses keuangan. Masih sejalan dengan hal tersebut, [Archer, Sharma, dan Su \(2020\)](#), menyatakan bahwa mengakses kredit formal dan layanan perbankan lainnya selalu menjadi tantangan penting bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Oleh karena itu, alternatif yang diambil cenderung mengarah pada akses kredit informal. Lebih lanjut, [Gitaharie, Soelistianingsih, and Djutaharta \(2014\)](#) menyatakan bahwa akses terhadap layanan keuangan pada rumah tangga di Indonesia, masih sangat rendah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menyediakan kemudahan akses kredit bagi pelaku usaha antara lain dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pemodalannya melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE/KUB). Namun, fasilitas tersebut belum dimanfaatkan dengan optimal. [Maryama \(2018\)](#) dan [Harefa \(2015\)](#) menyatakan bahwa meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas KUR bagi UMKM namun ternyata masih banyak pelaku usaha khususnya pelaku usaha informal yang belum bisa memperoleh fasilitas KUR dalam rangka pengembangan usahanya.

Permasalahan permodalan masih menjadi masalah utama bagi UMKM di Jawa Timur. Hasil survei perhitungan nilai tambah bruto Koperasi dan UMKM di Jawa Timur menunjukkan bahwa 27 persen UMKM di Jawa Timur mengalami kendala permodalan pada tahun 2021 yang terdiri dari keterbatasan modal usaha, jaminan dalam peminjaman kredit modal, dan bunga yang terlalu tinggi untuk kredit modal ([Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, 2022](#)).

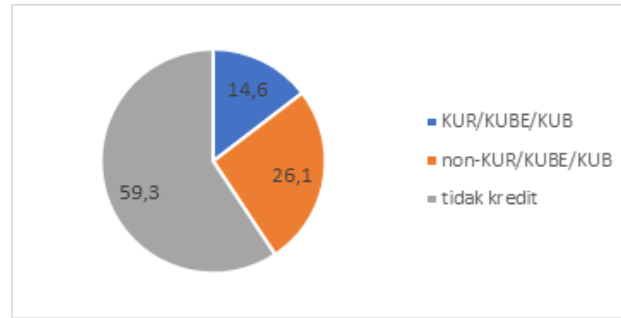


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

**Gambar 2: Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kredit Usaha yang Diterima, 2021**

Masih rendahnya persentase rumah tangga di Jawa Timur yang mengakses kredit usaha pada tahun 2021, dengan kisaran di bawah 9 persen pada seluruh jenis kredit usaha mengindikasikan masih terbatasnya akses kredit usaha sehingga perlu strategi konkrit untuk meningkatkannya. Dari keseluruhan UMKM, usaha mikro merupakan kontributor utama dalam perekonomian pada skala UMKM. Menurut [Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur \(2022\)](#), kontribusi usaha mikro terhadap keseluruhan nilai tambah bruto UMKM di Jawa Timur memegang porsi terbesar yaitu sebesar 33,74 persen (dengan merujuk klasifikasi usaha berdasarkan [UU No. 20 tahun 2008](#)).

Dengan demikian, fokus penyelesaian permasalahan permodalan dapat dilakukan pada usaha mikro di Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2021 di Jawa Timur yang menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga usaha mikro tidak mengakses kredit, sementara itu, persentase akses kredit KUR/KUBE/KUB pada rumah tangga usaha mikro masih sangat terbatas yaitu sebesar 14,6 persen, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3 berikut.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, BPS (diolah)

**Gambar 3: Persentase Rumah Tangga Usaha Mikro di Jawa Timur Menurut Akses Kredit, 2021**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, maka penting untuk mengetahui kondisi rumah tangga usaha mikro menurut karakteristiknya, serta mengetahui determinan akses pada rumah tangga usaha mikro di Provinsi Jawa Timur, secara keseluruhan maupun secara lebih spesifik pada masing-masing Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) sesuai dengan karakteristik masing-masing Bakorwil. Dengan mengetahui determinan akses kredit pada rumah tangga usaha mikro secara spesifik menurut regional Bakorwil di Jawa Timur maka akan diperoleh saran kebijakan yang cermat dan lebih tepat sasaran, sehingga akan mendorong integrasi UMKM khususnya usaha mikro dalam *Global Value Chain (GVC)* dan mengakselerasi ekspor di Jawa Timur.

#### Telaah Literatur

##### *Usaha Mikro dan Kredit Usaha*

Usaha mikro menurut [UU No. 20 Tahun 2008](#) didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Berdasarkan [UU No. 10 Tahun 1998](#) tentang perbankan, kredit didefinisikan sebagai kegiatan untuk menyediakan uang atau tagihan atau yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Terdapat beberapa jenis kredit yang disalurkan pada masyarakat di Indonesia. Salah satu jenis kredit adalah kredit usaha. Kredit usaha adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya ([Otoritas Jasa Keuangan, 2016](#)).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2008, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha kredit ([Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008, 2008](#)). Selanjutnya, Kementerian Koordinator Perekonomian mendefinisikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksud-

kan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Sedangkan KUB adalah kelompok usaha bersama yang digagas oleh Kementerian Pertanian, dan berfokus pada pemberdayaan usaha pada sektor pertanian serta berbagai subsektor yang tercakup di dalamnya.

Terkait akses pada kredit usaha, Myers (1984), menyampaikan Teori Urutan Pecking. Dalam teori ini sumber pembiayaan pada suatu usaha memiliki beberapa urutan. Pertama, perusahaan lebih memilih pembiayaan dari sumber internal, setelah sumber pendanaan internal tidak mencukupi, perusahaan akan beralih pada pinjaman atau investasi dari luar usahanya.

Akses pada layanan kredit usaha, akan mendorong integrasi UMKM pada *Global Value Chain (GVC)*. Harvie and Charoenrat (2016) menyatakan bahwa UMK dengan akses kredit ke bank lebih mungkin untuk bergabung dalam jaringan produksi secara global atau *Global Value Chain (GVC)*. Di tengah pandemi covid-19, GVC turut mengalami syok akibat pandemi. Han (2022) menjelaskan bahwa dalam berbagai perubahan drastis pada GVC di tengah pandemi, diperlukan kebijakan pemerintah untuk mempertahankan keterbukaan perdagangan dengan negara lain serta meningkatkan digitalisasi usaha untuk mengurangi dampak eksternal yang diakibatkan oleh produk-produk global. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Vutha, dkk (2021) di Indonesia, menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif dari akses kredit pada UMKM terhadap keputusan untuk masuk ke dalam *Global Value Chain (GVC)*.

Lwesya (2021) menyatakan beberapa tantangan utama UMK untuk mencapai pasar internasional adalah pemasaran yang terkait dengan aturan dan kompetisi global (69%), keterbatasan dari sisi penawaran (56%), iklim investasi yang kurang bersahabat (50%) dan hambatan finansial (37,5%). Studi yang dilakukan oleh Ogoi (2017) menghasilkan temuan bahwa usaha mikro kecil (UMK) di negara-negara berkembang, menghadapi tantangan yang signifikan pada akses kredit untuk mempertahankan keuntungan dan pertumbuhan bisnisnya.

### **Determinan Akses Kredit Usaha Mikro**

Penelitian tentang akses kredit UMKM telah dilakukan oleh Hoque, Sultana, dan Thalil (2016). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Usaha kecil dan menengah (UKM) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, UKM terkendala dalam hal akses ke kredit formal karena lembaga keuangan gagal memberikan kredit karena asimetri informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Khanie (2018) menemukan bahwa akses pada kredit oleh UKM di Botswana dipengaruhi oleh gender, kewarganegaraan, pengalaman usaha, ukuran perusahaan, sektor usaha, serta penjualan dan kepemilikan tanah. Oleh karena itu, kebijakan publik harus memperhatikan keragaman karakteristik sosial ekonomi UKM serta lingkungan

bisnis di mana mereka beroperasi ketika melaksanakan program bantuan keuangan. Langkah-langkah untuk mengembangkan UKM harus difokuskan secara cermat, bertujuan untuk memberikan insentif bagi lembaga keuangan untuk berperan aktif dalam pembiayaan UKM. Selain itu, penelitian tentang akses kredit di wilayah pedesaan di Thailand dilakukan oleh [Hemtanon & Gan \(2020\)](#) menggunakan data sosial ekonomi yang dianalisis dengan regresi logistik multinomial. Hasil dari penelitian ini adalah determinan akses kredit oleh masyarakat pedesaan di Thailand dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga seperti jumlah anggota rumah tangga, pendapatan, usia kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga. Selain itu, hasil penting lainnya adalah rumah tangga pedesaan Thailand meminjam dari banyak sumber sehingga mereka dapat memutar pembayaran pinjaman mereka. Rumah tangga berpenghasilan rendah membiayai kembali pinjaman mereka dengan meminjam dari sumber yang berbeda.

[Balios dkk \(2016\)](#) menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari jenis lapangan usaha terhadap keputusan pemilihan jenis kredit usaha yang diambil. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh [Twumasi dkk \(2019\)](#) yang menemukan bahwa pada rumah tangga usaha mikro pertanian, akses kredit secara signifikan dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah jumlah anggota rumah tangga.

Selain itu, [Gitaharie, Soelistianingsih, dan Djutaharta \(2014\)](#) menyatakan bahwa peluang rumah tangga untuk memperoleh kredit usaha dipengaruhi oleh karakteristik demografi (usia, jenis kelamin, status perkawinan, lokasi, pendidikan) dan faktor sosial ekonomi (bidang pekerjaan, status pekerjaan, status kemiskinan) dan efektivitas pelaksanaan perbankan. program pendidikan publik. Temuan penelitian ini sangat penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan akses kredit usaha kepada usaha rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh [Fongthong & Suriya \(2014\)](#) di Thailand menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari status kemiskinan rumah tangga terhadap akses kredit menggunakan logit model.

Penerimaan bantuan bagi usaha rumah tangga, baik dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di masa pandemi yang dapat menambah pendapatan internal usaha, diduga akan mempengaruhi akses kredit rumah tangga usaha mikro. [Forte, Barros, and Nakamura \(2013\)](#) menemukan bahwa usaha kecil dan menengah cenderung membiayai perluasan usaha mereka dengan utang hanya setelah menghabiskan sumber daya internal mereka.

Terkait dampak migrasi terhadap akses kredit usaha, penelitian yang dilakukan oleh [Hulten dan Ahmed \(2013\)](#) menemukan bahwa migran di Australia memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami kesulitan akses keuangan untuk usaha, dan melewatkan investasi karena akses keuangan yang kurang memadai dibandingkan dengan pengusaha asli Australia. Selain itu, [OECD \(2017\)](#) menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, migrasi dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga migran, dan lebih jauh lagi dapat meningkatkan pembangunan jangka panjang melalui peningkatan investasi dan kewirausahaan.

## Metode Penelitian

Data dalam penelitian ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 dan Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021 Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan jumlah unit analisis sebanyak 2.616 rumah tangga yang memiliki usaha mikro untuk menganalisis determinan akses kredit di Jawa Timur pada tahun 2021. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *software* STATA.

Dalam penelitian ini, penentuan usaha mikro berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 sesuai dengan konsep dan definisi yang digunakan pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah (BPS, 2021).

Pada penelitian ini, variabel terikat adalah pilihan akses kredit pada rumah tangga usaha mikro berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR)/KUBE/KUB, kredit non-KUR/KUBE/KUB, dan tidak mengakses kredit (kategori acuan). Kriteria penentuan variabel ini berdasarkan pedoman Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021. KUR merupakan salah satu skim kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan yang bekerja sama dengan Lembaga Penjamin yang ditetapkan oleh pemerintah. Fasilitas kredit modal kerja atau investasi ini diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang memiliki usaha produktif yang feasible tapi belum bankable. Sedangkan kredit KUBE/KUB program pemerintah yang mendorong pembentukan kelompok usaha untuk menjalankan kegiatan produktif. Kelompok ini dibentuk dari orang-orang/keluarga-keluarga kurang mampu/penerima manfaat program perlindungan sosial/keluarga PKH yang mengajukan proposal pembiayaan usaha secara berkelompok. Kementerian terkait kemudian akan menyeleksi proposal usaha kelompok tersebut dan kemudian menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp 20 juta untuk setiap kelompok yang terpilih sebagai penerima bantuan. Kategori variabel terikat yang kedua adalah akses kredit non-KUR/KUBE/KUB yaitu kredit bank selain KUR, BPR, koperasi, perorangan dengan bunga, pegadaian, perusahaan leasing, BUMDes, dan lainnya. Jika rumah tangga tidak mengakses kredit, maka dikategorikan pada variabel kategori acuan. Secara khusus dalam penelitian ini, jika pada satu rumah tangga mengakses kredit lebih dari satu pilihan, maka akan dikategorikan menurut kode terkecil yaitu KUR/KUBE/KUB, disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Variabel bebas yang digunakan menggunakan dua level yaitu variabel bebas level rumah tangga dan level kabupaten/kota. Variabel bebas tersebut meliputi: 1) jenis kelamin kepala rumah tangga 2) migrasi risen 3) internet 4) klasifikasi wilayah 5) kepemilikan PKH untuk berhutang 6) status kemiskinan 7) status usaha pekerjaan 8) penerima BPUM 9) lapangan usaha 10) jumlah anggota rumah tangga 11) jumlah koperasi dan 12) jumlah industri mikro dan kecil (IMK). Selain itu, dalam penelitian ini digunakan model menurut 5 Bakorwil di Jawa Timur untuk melihat determinan secara spasial sesuai karakteristik masing-masing Bakorwil.

Variabel jenis kelamin kepala rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan (kategori acuan). Variabel migrasi risen dikategorikan menjadi apakah di rumah tangga tersebut ada yang pernah bermigrasi risen atau tidak (kategori acuan). Seseorang dikatakan sebagai migran risen, yaitu apabila provinsi tempat tinggal lima tahun yang lalu berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang (pada saat pencacahan). Variabel internet dikategorikan menjadi menggunakan atau tidak menggunakan internet untuk usaha (kategori acuan). Variabel ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang digitalisasi usaha, terutama penggunaan internet pada usaha mikro. Klasifikasi wilayah tempat tinggal dikategorikan menjadi perdesaan (kategori acuan) dan perkotaan. Variabel kepemilikan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk berhutang adalah bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) bagi suatu rumah tangga yang peruntukannya salah satunya digunakan untuk membayar hutang pada rumah tangga tersebut. Variabel ini dibedakan menjadi dua yaitu memiliki Program Keluarga Harapan (PKH) dan digunakan untuk membayar hutang dan lainnya (kategori acuan). Variabel status kemiskinan merupakan status kemiskinan rumah tangga berdasarkan pengeluaran per kapita sebulan. Variabel ini dibedakan menjadi miskin dan tidak miskin (kategori acuan).

uan). Status usaha dalam pekerjaan dibagi menjadi dua kategori pengusaha individu (kategori acuan) dan selain pengusaha individu. Pendekatan kategori status usaha menggunakan status dalam pekerjaan utama yaitu pekerja individu yang berusaha sendiri, dan pekerja non individu yang dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar maupun dibantu buruh tetap/dibayar.

Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan program baru yang diluncurkan dengan tujuan untuk membantu usaha mikro agar mampu bertahan dalam menjalankan usaha di tengah krisis akibat Pandemi Covid-19 dan membantu pemulihan ekonomi. Variabel ini dikategorikan menjadi rumah tangga menerima BPUM dan tidak menerima BPUM (kategori acuan). Kategori pada variabel lapangan usaha dikategorikan menjadi primer (kategori acuan), sekunder (industri pengolahan, konstruksi/bangunan, pertambangan/penggalan, listrik dan gas), dan sektor tersier/jasa. Apabila dalam satu rumah tangga terdapat lebih dari satu lapangan usaha yang dikerjakan oleh anggota rumah tangga, maka dalam penelitian ini dipilih satu lapangan usaha utama di rumah tangga tersebut berdasarkan waktu/jam kerja terbanyak.

Variabel jumlah anggota rumah tangga merupakan jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga usaha mikro berupa data skala rasio. Variabel yang bersumber dari Pendataan Potensi Desa (Podes) BPS tahun 2021 adalah jumlah koperasi dan jumlah industri mikro dan kecil (IMK) pada kabupaten/kota rumah tangga tersebut tinggal. Jumlah koperasi terdiri dari koperasi unit desa, koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat, koperasi simpan pinjam, serta koperasi lainnya. Sedangkan jumlah industri mikro adalah jumlah seluruh industri mikro dan kecil yang terdapat di kabupaten/kota rumah tangga tersebut tinggal (BPS, 2021a).

Dalam penelitian ini, determinan sosial ekonomi akses KUR/KUBE/KUB pada rumah tangga usaha mikro tidak hanya dilihat secara agregat pada Provinsi Jawa Timur, namun juga dianalisis secara spesifik pada masing-masing Bakorwil di Jawa Timur. Pembagian daerah di Jawa Timur menurut Bakorwil mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Bakorwil 1 terdiri dari Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, Kediri, Kota Madiun dan Kota Kediri. Bakorwil 2 terdiri dari Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Jombang, Mojokerto, Gresik, Nganjuk, dan Kota Mojokerto. Bakorwil 3 terdiri dari Kabupaten Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Blitar, Kota Malang, Batu, Pasuruan dan Surabaya. Bakorwil 4 yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, Sampang dan Sumenep. Bakorwil 5 meliputi Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Banyuwangi, dan Kota Probolinggo.

Analisis statistik deskriptif dan inferensia digunakan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini. Analisis statistik inferensia yang digunakan adalah regresi logistik multinomial. Analisis regresi logistik multinomial digunakan untuk kasus variabel respon dengan data berskala nominal yang terdiri dari tiga kategori atau lebih (Agresti, 2012).

Model umum regresi logistik multinomial yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{P(Y=j|x)}{P(Y=0|x)}\right) = \beta_{j0} + \beta_{j1}jk + \beta_{j2}risen + \beta_{j3}internet + \beta_{j4}klasifikasi + \beta_{j5}pkh-hutan + \beta_{j6}stat-miskin + \beta_{j7}stat-usaha + \beta_{j8}bpum + \beta_{j9}industri + \beta_{j10}jasa + \beta_{j11}art + \beta_{j12}koperasi + \beta_{j13}imk + \varepsilon \quad (1)$$

dimana:

$$\left( \frac{P(Y = 1 | x)}{P(Y = 0 | x)} \right) : \text{Probabilitas akses kredit KUR/KUBE/KUB, dibandingkan dengan tidak mengakses kredit.}$$

$$\left( \frac{P(Y = 2 | x)}{P(Y = 0 | x)} \right) : \text{Probabilitas akses kredit non-KUR/KUBE/KUB, dibandingkan dengan tidak mengakses kredit.}$$

Parameter-parameter dalam model tersebut diestimasi dengan menggunakan metode *maximum likelihood*. Selanjutnya, model regresi logistik yang dihasilkan, harus bermakna dimana dilakukan signifikansi model baik secara keseluruhan (simultan) maupun secara individu (parsial). Uji simultan dalam analisis regresi logistik menggunakan uji statistik G dan uji parsial menggunakan uji Wald (Hosmer, Lemeshow, dan Sturdivant, 2013). Selanjutnya, parameter yang dihasilkan dari analisis regresi logistik akan dianalisis menggunakan efek marginal. Efek marginal dalam interpretasi hasil regresi logistik, dapat menyajikan pengaruh/efek pada variabel bebas saat variabel lain konstan terhadap peluang setiap kategori model regresi logistik (Greene, 2003).

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari analisis data Susenas Maret 2021 dan Potensi Desa 2021 pada penelitian ini, dapat diperoleh beberapa informasi baru terkait profil rumah tangga usaha mikro serta determinan sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap akses kredit usaha. Hasil penelitian akan terbagi dalam beberapa sub bagian sebagai berikut.

#### **Karakteristik Rumah Tangga Usaha Mikro di Jawa Timur**

Pada tahun 2021, terdapat 864,9 ribu rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur yang terdiri dari karakteristik yang beragam. Ciri dari rumah tangga usaha mikro yang pelaporan keuangannya masih menyatu dengan keuangan rumah tangga menjadi salah satu persoalan tersendiri sehingga usaha mikro tidak terlepas dari berbagai faktor yang melekat dengan kondisi rumah tangga seperti jumlah anggota rumah tangga, latar belakang kepala rumah tangga, status kemiskinan rumah tangga, dan masuknya suatu rumah tangga dalam program perlindungan sosial.

Dari seluruh rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur, hanya 14,6 persen yang mengakses KUR/KUBE/KUB pada tahun 2021. Sementara itu, hasil survei kegiatan usaha pada masa pandemi covid-19 di Jawa Timur, mencatat bahwa 60,97 persen pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Jawa Timur memerlukan dan mengharapkan adanya bantuan modal usaha (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022a).

Tabel 2. menunjukkan beberapa kondisi rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur pada tahun 2021. Di tengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung, dan kemajuan pesat digitalisasi usaha khususnya penggunaan internet dalam kegiatan usaha pada beberapa tahun terakhir, belum dimanfaatkan dengan optimal oleh rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur. Pada tahun 2021, delapan dari sepuluh rumah tangga usaha mikro masih belum menggunakan internet untuk kegiatan usahanya. Padahal, pemanfaatan internet dengan baik dapat memudahkan akses informasi, salah satunya tentang KUR/KUBE/KUB. Hal ini sejalan dengan persentase rumah tangga usaha mikro menurut akses kredit, di antara 3 jenis klasifikasi, pengguna internet untuk usaha yang terbesar terdapat pada pengakses KUR/KUBE/KUB.

**Tabel 2: Karakteristik Usaha Mikro Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Akses Kredit, 2021**

Karakteristik		Tidak Mengakses Kredit	Mengakses KUR/ KUBE/KUB	Mengakses non-KUR/ KUBE/KUB	Total
Jenis Kelamin	Laki-laki	87.0%	94.1%	86.8%	87.9%
	Perempuan	13.0%	5.9%	13.2%	12.1%
Migrasi Risen	Non-migran	91.1%	92.7%	91.8%	91.5%
	Migran	8.9%	7.3%	8.2%	8.5%
Internet	Tidak menggunakan	80.3%	72.6%	78.3%	78.7%
	menggunakan	19.7%	27.4%	21.7%	21.3%
Klasifikasi Wilayah	Pedesaan	35.7%	36.2%	39.2%	36.6%
	Perkotaan	64.3%	63.8%	60.8%	63.4%
PKH untuk Membayar Hutang	Tidak untuk Hutang	99.7%	99.3%	97.7%	99.2%
	Untuk Hutang	0.3%	0.7%	2.3%	0.8%
Status Kemi-skinan	Tidak Miskin	91.9%	96.4%	93.3%	92.8%
	Miskin	8.1%	3.6%	6.7%	7.2%
Status Usaha	Pengusaha individu	27.5%	34.0%	32.0%	29.5%
	Lainnya	72.5%	66.0%	68.0%	70.5%
Penerima Bantuan Usaha Mikro	Tidak Menerima	90.3%	90.0%	86.4%	89.3%
	Menerima	9.7%	10.0%	13.6%	10.7%
Lapangan Usaha	Pertanian	19.7%	22.1%	19.3%	19.9%
	Industri	47.1%	48.6%	47.8%	47.5%
	Jasa	33.2%	29.3%	32.9%	32.6%

Sumber: Susenas Maret 2021, Podes 2021, BPS (diolah)

Bila memperhatikan karakteristik klasifikasi tempat tinggal, rumah tangga usaha mikro yang tinggal di daerah berklasifikasi perkotaan, lebih besar persentasenya dalam mengakses KUR/KUBE/KUB maupun non-KUR/KUBE/KUB dibandingkan dengan rumah tangga usaha mikro yang tinggal di pedesaan. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa wilayah perkotaan lebih mudah dalam akses kredit bagi rumah tangga usaha mikro. Hasil pengolahan pada data hasil pendataan Potensi Desa (PODES) di Jawa Timur tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah Bank Umum baik pemerintah maupun swasta, masih terkonsentrasi di daerah perkotaan, hanya 15 persen bank umum yang berada di wilayah pedesaan. Padahal, penyaluran KUR hanya disalurkan terbatas melalui Bank Umum Pemerintah maupun swasta dan beberapa koperasi simpan pinjam tertentu yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Sehingga, akses rumah tangga usaha mikro pada fasilitas KUR bagi yang tinggal di daerah perkotaan akan menjadi lebih mudah.

Bila memperhatikan kondisi latar belakang kesejahteraan rumah tangga usaha mikro, masih terdapat rumah tangga usaha mikro yang menjadi penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan yang digunakan untuk membayar hutang. Rumah tangga usaha mikro yang menggunakan PKH nya untuk membayar hutang, persentase terbesarnya adalah pengakses kredit non-KUR/KUBE/KUB yaitu sebesar 2.3 persen.

Selain itu, rumah tangga usaha mikro yang berstatus miskin, persentase terbesarnya masuk dalam golongan rumah tangga usaha mikro yang tidak mengakses kredit yaitu sebesar

8.1 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengentasan kemiskinan pada rumah tangga usaha mikro harus dilakukan terlebih dahulu, sebelum mendorong rumah tangga usaha mikro mengakses kredit untuk memperbesar skala dan produktivitas usahanya.

Pada tahun 2021, satu dari sepuluh rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur telah menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang secara khusus diberikan pada masa pandemi covid-19, persentase terbesarnya berada pada golongan rumah tangga usaha mikro mengakses kredit non-KUR/KUBE/KUB yaitu sebesar 13,6 persen. Hal ini dapat mengindikasikan ketepatan penggunaan BPUM, dimana BPUM telah digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha, sehingga mereka memilih mengakses kredit non-KUR/KUBE/KUB untuk memenuhi kebutuhan konsumtif rumah tangganya.

Berdasarkan jenis lapangan usaha, hampir separuh dari seluruh rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur pada tahun 2021 bergerak pada sektor industri manufaktur, dengan persentase sebesar 47,5 persen. Dalam mengakses kredit, rumah tangga usaha mikro pada sektor industri manufaktur sebagian besar mengakses KUR/KUBE/KUB. Hal ini dapat memberi indikasi positif, mengingat percepatan ekspor dan partisipasi dalam *Global Value Chain (GVC)* sebagian besar bertumpu pada sektor industri manufaktur, maka dengan kondisi ini dapat memunculkan optimisme pada rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur untuk berkembang dengan pesat.

### **Determinan Kredit Usaha pada Rumah Tangga Usaha Mikro di Jawa Timur**

Pada tabel 3 berikut, dapat diketahui hasil dari analisis regresi logistik multinomial untuk mengetahui determinan akses KUR/KUBE/KUB pada rumah tangga usaha mikro, beserta dengan efek marjinal pada masing-masing variabel penelitian.

**Tabel 3: Hasil Regresi Logistik Multinomial dengan Marginal Effect Model Provinsi Jawa Timur**

Determinan	Tidak Mengakses Kredit	Mengakses KUR/KUBE/KUB	Mengakses non-KUR/KUBE/KUB
Perempuan	0.026	-0.061**	0.035
Migran	0.013	-0.013	0.000
Internet	-0.028	0.027*	0.001
Perkotaan	0.025	-0.004	-0.021
PKH Untuk Hutang	-0.369	0.000	0.369***
Miskin	0.121	-0.091**	-0.031*
Non Pengusaha Individu	0.055	-0.017*	-0.038**
Menerima BPUM	-0.054	0.008	0.046**
Lapus Industri	-0.006	-0.012	0.018
Lapus Jasa	-0.002	-0.021	0.023
Jumlah ART	-0.041	0.015***	0.026***
Jumlah Koperasi	-0.000	0.000***	-0.000
Jumlah IMK	0.000	0.000	0.000
Total observasi :	2616		
Pseudo R <sup>2</sup> :	0.0223		
LR $\chi^2$ :	106.91		

Sumber: Susenas Maret 2021, Podes 2021, BPS (diolah)

\*\*\* signifikan pada taraf 1%

\*\*signifikan pada taraf 5%

\*signifikan pada taraf 10%

Berdasarkan hasil estimasi model secara keseluruhan di Jawa Timur, rumah tangga usaha mikro yang mengakses KUR/KUBE/KUB, secara signifikan dipengaruhi oleh jenis kelamin kepala rumah tangga, digitalisasi usaha, status kemiskinan rumah tangga, status pengusaha, jumlah anggota rumah tangga, dan jumlah koperasi di Kabupaten/Kota tempat tinggalnya. Sejalan dengan [Nopitasari dan Handayani \(2020\)](#); [Gitaharie, Soelistianingsih, dan Djutaharta \(2014\)](#); [Yusuf, Shirazi, dan Ghani \(2013\)](#); [Ashraf dan Ibrahim \(2014\)](#) dalam penelitian-penelitian tersebut, jenis kelamin kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap keputusan mengakses kredit untuk usaha rumah tangganya. Kepala rumah tangga dengan jenis kelamin perempuan, erat dengan status miskin dan kesulitan dalam mengakses kredit usaha ([Fongthong & Suriya, 2014](#)). Dalam penelitian ini, rumah tangga usaha mikro dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan akan menurunkan peluang untuk mengakses KUR/KUBE/KUB sebesar 6,2 persen.

Penggunaan internet dalam usaha akan meningkatkan peluang untuk mengakses KUR/KUBE/KUB sebesar 2,7 persen. Hal ini sejalan dengan kemudahan mengakses informasi terkait kredit usaha yang telah memasuki era digitalisasi. Selain itu, usaha yang telah melakukan digitalisasi berpeluang untuk meningkatkan produktivitas dan skala usahanya, termasuk melalui akses kredit usaha. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh [Han \(2022\)](#) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa keterbukaan perdagangan dan digitalisasi usaha akan meningkatkan kemampuan suatu usaha untuk bertahan dari tekanan perekonomian global, termasuk berbagai hambatan dalam akses pembiayaan.

Status kesejahteraan rumah tangga usaha mikro juga berpengaruh signifikan terhadap akses KUR/KUBE/KUB. Peluang rumah tangga usaha mikro untuk mengakses KUR/KUBE/KUB, mengalami penurunan pada rumah tangga yang berstatus miskin. Penurunan peluang yang terjadi adalah sebesar 9 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga usaha mikro yang berstatus miskin, masih berfokus pada peningkatan kesejahteraan rumah tangganya, sehingga belum terfokus pada pengembangan usaha mikro yang dijalankan. Hasil penelitian ini, selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh [Nopitasari dan Handayani \(2020\)](#); [Gitaharie, Soelistianingsih, dan Djutaharta \(2014\)](#); [Yusuf, Shirazi, dan Ghani \(2013\)](#); [Ashraf dan Ibrahim \(2014\)](#) yang menunjukkan bahwa status kemiskinan rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk mengakses kredit usaha.

Selain itu, jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga usaha mikro berpengaruh signifikan dan positif pada keputusan untuk mengakses KUR/KUBE/KUB. Setiap penambahan satu orang anggota rumah tangga, maka akan meningkatkan peluang rumah tangga usaha mikro untuk mengakses KUR/KUBE/KUB sebesar 15 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah orang yang bergantung pada jalannya usaha mikro di rumah tangga tersebut, maka akan memberikan motivasi lebih untuk meningkatkan produktivitas usaha melalui akses kredit usaha. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [Nopitasari dan Handayani, 2020](#); [Hoque, Sultana, dan Thalil \(2016\)](#); [Yusuf, Shirazi, and Ghani \(2013\)](#) yang telah menguji bahwa jumlah anggota rumah tangga secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan rumah tangga untuk mengakses kredit usaha.

Bila menganalisis pada karakteristik pengusaha, maka dapat diketahui bahwa pengusaha yang berusaha dengan menggunakan pekerja, baik pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, akan menurunkan peluang untuk mengakses KUR/KUBE/KUB sebesar 1,7 persen. Pengaruh status pengusaha yang signifikan terhadap keputusan mengakses kredit usaha telah diteliti sebelumnya oleh [Khanie \(2018\)](#) dan [Gitaharie, Soelistianingsih, dan Djutaharta \(2014\)](#) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari ukuran atau skala usaha dengan akses terhadap kredit usaha.

Secara karakteristik kewilayahan, jumlah koperasi di Kabupaten/Kota tempat domisili rumah tangga usaha mikro memiliki pengaruh yang signifikan dan positif pada akses KUR/KUBE/KUB. Semakin banyak jumlah koperasi di Kabupaten/Kota akan meningkatkan peluang rumah tangga usaha mikro untuk mengakses KUR/KUBE/KUB. Hal ini sesuai dengan karakteristik koperasi yang dapat menyentuh perekonomian hingga di level mikro rumah tangga. Hasil penelitian ini sejalan dengan [Nopitasari dan Handayani \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa jumlah koperasi berpengaruh signifikan terhadap akses kredit usaha.

Dalam mengakses kredit non-KUR/KUBE/KUB, rumah tangga usaha mikro dipengaruhi secara signifikan oleh penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pembayaran hutang, status kemiskinan rumah tangga, status pengusaha, status penerimaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan jumlah anggota rumah tangga. Rumah tangga usaha mikro yang menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan menggunakannya untuk membayar hutang, meningkatkan peluang untuk mengakses kredit non-KUR/KUBE/KUB sebesar 36,90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga usaha mikro yang masih mengalami kekurangan dalam kesejahteraan rumah tangganya masih belum berfokus pada pengembangan usaha mikro yang dijalankan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Nguyen dan Luu \(2013\)](#); [Heikkilä, Kalmi, dan Ruuskanen \(2016\)](#) yang menunjukkan bahwa rumah tangga usaha yang memiliki kesulitan untuk mengakses permodalan secara formal, akan mengakses sumber pendanaan lain atau sumber pendanaan informal.

Masih sejalan dengan pembahasan sebelumnya, rumah tangga usaha mikro yang menjadi penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang secara khusus diluncurkan pemerintah untuk menyelamatkan usaha mikro di tengah pandemi, mengalami peningkatan peluang sebesar 4,6 persen untuk memilih kredit non-KUR/KUBE/KUB. BPUM yang diperuntukkan secara khusus bagi usahanya telah dialokasikan untuk pembiayaan usahanya, sehingga secara umum rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain untuk usaha akan mengandalkan akses kredit non-KUR/KUBE/KUB.

#### ***Determinan Kredit Usaha pada Rumah Tangga Usaha Mikro di Jawa Timur menurut Bakorwil***

Selain mengetahui determinan kredit usaha pada rumah tangga usaha mikro secara umum di Jawa Timur yang telah dibahas sebelumnya, pada penelitian ini juga dilakukan analisis terhadap determinan kredit usaha secara spesifik pada masing-masing Bakorwil di Jawa Timur. Hasil dari analisis regresi logistik multinomial yang dilakukan pada setiap Bakorwil menunjukkan hasil yang bervariasi pada setiap Bakorwil. Determinan yang signifikan berpengaruh terhadap kredit usaha pada satu bakorwil dapat menjadi determinan yang tidak signifikan berpengaruh pada bakorwil lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa model Bakorwil yang dianalisis pada penelitian ini menunjukkan adanya variasi hasil yang berdampak pula pada implikasi kebijakan yang bervariasi pada masing-masing bakorwil.

**Tabel 4: Hasil Regresi Logistik Multinomial dengan Marginal Effect Model Menurut Bakorwil**

Determinan	Tidak Mengakses Kredit	Bakorwil 1		Tidak Mengakses Kredit	Bakorwil 2	
		Mengakses KUR/KUBE/KUB	Mengakses non-KUR/KUBE/KUB		Mengakses KUR/KUBE/KUB	Mengakses non-KUR/KUBE/KUB
Perempuan	-0.065	-0.013	0.078*	0.080	-0.116*	0.036
Migran	0.016	0.006	-0.022	0.036	-0.142	0.106
Internet	-0.067	0.055**	0.012	-0.076	-0.010	0.087*

Determinan	Bakorwil 1			Bakorwil 2		
	Tidak Mengakses Kredit	Mengakses KUR/ KUBE/KUB	Mengakses non-KUR/ KUBE/KUB	Tidak Mengakses Kredit	Mengakses KUR/ KUBE/KUB	Mengakses non-KUR/ KUBE/KUB
Perkotaan	0.004	0.013	-0.017	0.053	-0.030	-0.026
PKH Untuk Hutang	0.554	-1.402	0.848***	-2.618	-0.671	3.289
Miskin	0.099	-0.004	-0.095**	1.089	-1.723	0.635
Non Pengusaha Individu	0.067	-0.036	-0.032	0.048	0.020	-0.068
Menerima BPUM	-0.024	0.031	-0.006	-0.020	-0.152*	0.172**
Lapus Industri	-0.042	0.004	0.037	-0.044	0.042	0.002
Lapus Jasa	-0.013	0.006	0.007	0.033	-0.005	-0.028
Jumlah ART	-0.055	0.0217***	0.034***	-0.017	0.018	-0.002
Jumlah Kop-erasi	-0.000	0.000	0.000**	-0.000	0.000	0.000
Jumlah IMK	0.000	0.000	0.000***	0.000	0.000	0.000

Lanjutan Tabel 4

Determinan	Bakorwil 3			Bakorwil 4		
	Tidak Mengakses Kredit	Mengakses KUR/ KUBE/KUB	Mengakses non-KUR/ KUBE/KUB	Tidak Mengakses Kredit	Mengakses KUR/ KUBE/KUB	Mengakses non-KUR/ KUBE/KUB
Perempuan	0.146	-0.070*	-0.076*	-0.126	0.274	-0.148
Migran	-0.027	-0.041	0.067	2.069	-0.166	-1.902
Internet	0.029	-0.007	-0.022	2.286	0.090	-2.375
Perkotaan	-0.084	0.024	0.060	-0.227	0.559	-0.332
PKH Untuk Hutang	-2.314	-0.359	2.673	-0.150	0.042	0.108
Miskin	0.795	-0.982	0.186	2.173	-0.294	-1.879
Non Pengusaha Individu	0.079	0.022	-0.101*	-0.510	0.353	0.157*
Menerima BPUM	-0.068	0.069**	-0.001	0.234	-0.585	0.352*
Lapus Industri	0.042	-0.017	-0.024	0.162	-0.186	0.024
Lapus Jasa	-0.015	0.037	-0.022	0.338	-0.212	-0.123
Jumlah ART	-0.052	0.009*	0.043**	0.033	-0.033	0.000
Jumlah Kop-erasi	0.000	0.000	-0.000	0.002	-0.004	0.001
Jumlah IMK	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000

**Lanjutan Tabel 4**

Determinan	Tidak Mengakses Kredit	Bakorwil 5	
		Mengakses KUR/ KUBE/KUB	Mengakses non-KUR/ KUBE/KUB
Perempuan	-0.041	-0.082	0.123*
Migran	0.030	0.037	-0.067
Internet	0.016	0.037	-0.054
Perkotaan	0.052	0.003	-0.054
PKH Untuk Hutang	-0.182	-0.034	0.216
Miskin	0.112	-0.164*	0.052
Non Pengusaha Individu	0.051	-0.040	-0.010
Menerima BPUM	-0.073	0.003	0.070
Lapus Industri	0.064	-0.076*	0.012
Lapus Jasa	0.038	-0.114**	0.076
Jumlah ART	-0.522	0.024***	0.028***
Jumlah Koperasi	0.000	0.000	-0.000**
Jumlah IMK	0.000	-0.000**	0.000

Sumber: Susenas Maret 2021, Podes 2021, BPS (diolah)

\*\*\* signifikan pada taraf 1%

\*\*signifikan pada taraf 5%

\*signifikan pada taraf 10%

Masing-masing Bakorwil di Jawa Timur memiliki karakteristik regional yang berbeda-beda, maka determinan akses KUR/KUBE/KUB juga beragam pada pada setiap Bakorwil. Berdasarkan hasil estimasi model pada Bakorwil 1, diketahui bahwa determinan akses KUR/KUBE/KUB yang berpengaruh secara signifikan adalah internet dan jumlah anggota rumah tangga. Sementara itu, determinan yang signifikan berpengaruh pada akses non-KUR/KUBE/KUB adalah jenis kelamin kepala rumah tangga, penggunaan PKH untuk membayar hutang, status kemiskinan, jumlah anggota rumah tangga, jumlah koperasi di Kabupaten/Kota dan jumlah IMK di Kabupaten/Kota. Pada bakorwil ini, rumah tangga usaha mikro dengan penggunaan internet untuk usaha akan meningkatkan peluang untuk mengakses KUR/KUBE/KUB sebesar 5,51 persen. Potensi ini sejalan dengan penggunaan internet pada rumah tangga secara keseluruhan pada Bakorwil ini, dengan persentase di atas 80 persen pada masing-masing Kabupaten/Kota pada Bakorwil ini (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022c).

Pada Bakorwil 2, determinan yang mempengaruhi akses KUR/KUBE/KUB adalah jenis kelamin dan menerima BPUM. Sementara itu determinan akses kredit non-KUR/KUBE/KUB adalah internet dan BPUM. Rumah tangga usaha mikro yang menerima BPUM akan mengalami penurunan peluang untuk mengakses KUR/KUBE/KUB sebesar 15,18 persen, dan sebaliknya dapat meningkatkan peluang untuk mengakses non-KUR/KUBE/KUB sebesar 17,22 persen.

Jenis kelamin, penerima BPUM, dan jumlah anggota rumah tangga, secara signifikan berpengaruh pada akses KUR/KUBE/KUB pada Bakorwil 3. Sementara itu, determinan yang secara signifikan berpengaruh pada akses non-KUR/KUBE/KUB di Bakorwil 3 adalah jenis kelamin, status pengusaha dan jumlah anggota rumah tangga. Bakorwil 3, merupakan kontributor terbesar pada keseluruhan perekonomian Jawa Timur. Di tahun 2021, total PDRB Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Bakorwil 3 adalah sebesar 51,00 persen dari keseluruhan

perekonomian Jawa Timur (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022b). Perekonomian pada Bakorwil 3 yang secara umum ditopang oleh sektor industri manufaktur antara lain di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan, serta sektor jasa di Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Batu turut mempengaruhi kondisi akses kredit usaha pada wilayah ini. Pada saat pandemi, sektor industri dan jasa mengalami kontraksi yang kuat pada beberapa daerah di bakorwil ini. Kenaikan peluang rumah tangga usaha mikro penerima BPUM untuk mengakses kredit usaha yang sebesar 6,94 persen pada bakorwil 3, dapat mengindikasikan bahwa bantuan BPUM yang diterima oleh rumah tangga usaha mikro pada bakorwil 3 telah teralokasikan dengan optimal untuk membantu menyelamatkan usaha yang terkontraksi kuat saat pandemi. Di tengah masa pemulihan efek pandemi, adanya perbaikan iklim usaha dan *economic rebound* yang terjadi dengan cepat di Bakorwil 3, dapat memperkuat keyakinan pelaku usaha untuk bangkit dari dampak pandemi. Hal ini ditandai dengan peningkatan peluang untuk mengakses KUR/KUBE/KUB pada penerima BPUM, yang juga mengindikasikan potensi pengembangan usaha dan integrasi dalam *Global Value Chain (GVC)*. Sementara, pada usaha dengan omset besar, peningkatan peluang untuk mengakses KUR/KUBE/KUB menunjukkan adanya potensi untuk pengembangan usaha yang diindikasikan dengan besarnya modal usaha yang diperlukan baik bersumber dari BPUM maupun KUR/KUBE/KUB.

Pada bakorwil 4, determinan yang mempengaruhi akses non-KUR/KUBE/KUB secara signifikan adalah status pengusaha dan penerimaan BPUM. Rumah tangga usaha mikro yang menjadi penerima BPUM mengalami peningkatan peluang sebesar 35,17 persen untuk mengakses kredit non-KUR/KUBE/KUB. Karakteristik kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah bakorwil 4 adalah daerah dengan persentase penduduk miskin yang lebih dari 20 persen pada beberapa kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang dan Sumenep (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022d). Kenaikan peluang akses kredit non-KUR dan KUB/KUBE pada bakorwil 4 ini dapat terjadi jika rumah tangga usaha mikro memperoleh Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Terdapat indikasi bahwa bantuan usaha mikro yang diterima rumah tangga, masih terbatas untuk memastikan keberlangsungan usaha di tengah pandemi. Hal ini sejalan dengan Myers (1984), bahwa suatu usaha memiliki urutan prioritas dalam memilih sumber pembiayaan usaha. Saat suatu usaha dapat mencukupi pembiayaan secara internal, maka usaha tersebut tidak akan mencari sumber pembiayaan dari luar. Dengan demikian, fenomena yang terjadi pada Bakorwil 4, menunjukkan belum terlihat adanya potensi peningkatan produktivitas usaha yang ditandai dengan tidak adanya peningkatan kebutuhan akses pemodal melalui KUR/KUBE/KUB.

Hasil estimasi model pada Bakorwil 5, menunjukkan determinan yang signifikan mempengaruhi akses KUR/KUBE/KUB pada rumah tangga usaha mikro yaitu status kemiskinan rumah tangga, jenis lapangan usaha industri, jenis lapangan usaha jasa, jumlah anggota rumah tangga, dan jumlah industri mikro kecil (IMK) di Kabupaten/Kota. Sementara itu, determinan mengakses non-KUR/KUBE/KUB yang berpengaruh secara signifikan adalah jenis kelamin, jumlah anggota rumah tangga dan jumlah koperasi di Kabupaten/Kota. Peluang mengakses KUR/KUBE/KUB akan mengalami peningkatan jika rumah tangga usaha mikro berstatus tidak miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga usaha mikro yang tidak miskin dapat berfokus pada peningkatan produktivitas usaha melalui akses KUR/KUBE/KUB. Selain itu, bila mempertimbangkan potensi perekonomian regional, Bakorwil 5 merupakan daerah dengan potensi perekonomian dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember adalah penyumbang terbesar dalam pembentukan nilai tambah sektor pertanian di Jawa Timur dengan total kontribusi sebesar 16,33 persen terhadap keseluruhan nilai tambah sektor pertanian di Jawa Timur (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022b).

## Simpulan

Dari seluruh rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur, hanya 14,6 persen yang mengakses KUR/KUBE/KUB. Karakteristik sosial rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut. Rumah tangga usaha mikro yang tinggal di daerah berklasifikasi perkotaan, lebih besar persentasenya dalam mengakses KUR/KUBE/KUB maupun non-KUR/KUBE/KUB dibandingkan dengan rumah tangga usaha mikro yang tinggal di pedesaan. Rumah tangga usaha mikro yang menggunakan PKH nya untuk membayar hutang, persentase terbesarnya adalah pengakses kredit non-KUR/KUBE/KUB yaitu sebesar 2.3 persen. Rumah tangga usaha mikro yang berstatus miskin, persentase terbesarnya masuk dalam golongan rumah tangga usaha mikro yang tidak mengakses kredit yaitu sebesar 8.1 persen.

Selanjutnya, karakteristik perekonomian yang melekat pada rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur adalah sebagai berikut. Delapan dari sepuluh rumah tangga usaha mikro masih belum menggunakan internet untuk kegiatan usahanya. Satu dari sepuluh rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur telah menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang secara khusus diberikan pada masa pandemi covid-19, persentase terbesarnya berada pada golongan rumah tangga usaha mikro pengakses kredit non-KUR/KUBE/KUB yaitu sebesar 13,6 persen. Hampir separuh dari seluruh rumah tangga usaha mikro di Jawa Timur pada tahun 2021 bergerak pada sektor industri manufaktur, dengan persentase sebesar 47,5 persen. Dalam keputusan akses kredit, sebagian besar rumah tangga usaha mikro pada sektor industri manufaktur mengakses KUR/KUBE/KUB.

Berdasarkan hasil estimasi model secara keseluruhan di Jawa Timur, rumah tangga usaha mikro yang mengakses KUR/KUBE/KUB, secara signifikan dipengaruhi oleh jenis kelamin, internet, status kemiskinan rumah tangga, status pengusaha, jumlah anggota rumah tangga, dan jumlah koperasi di Kabupaten/Kota tempat tinggalnya. Secara umum, pemerintah setempat perlu untuk mengutamakan penyelesaian masalah kesejahteraan rumah tangga usaha mikro sebelum mendorong pengembangan usahanya. Penerapan UU Cipta Kerja yang mulai diterapkan pada tahun 2021, akan berdampak pada perluasan cakupan usaha mikro yang membawa konsekuensi pada iklim dan persaingan usaha yang lebih luas, sehingga usaha mikro yang berbasis rumah tangga perlu dipersiapkan dengan optimal untuk masuk dalam era baru dunia usaha mikro. Dalam memasuki era baru tersebut, diperlukan basis data terpadu dalam upaya pemetaan usaha mikro menurut status kesejahteraannya. Data yang lengkap untuk mengklasifikasikan usaha mikro rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan dapat mendukung pemberian treatment yang tepat bagi masing-masing rumah tangga usaha mikro. Basis data terpadu yang akurat dan terstandar dapat diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah setempat dengan pembina data dalam kerangka Satu Data UMKM dan Satu Data Indonesia (SDI).

Pada Bakorwil 1, diketahui bahwa determinan akses KUR/KUBE/KUB yang berpengaruh secara signifikan adalah internet dan jumlah anggota rumah tangga. Maka, pemerintah dapat mendorong proses digitalisasi usaha pada wilayah ini. Pemerintah dapat memberikan edukasi terkait penggunaan internet dalam usaha. Edukasi yang dapat diberikan berupa pengelolaan keuangan usaha secara digital melalui aplikasi buku kas, pelatihan proses produksi secara daring agar dapat meningkatkan output usaha, edukasi pemasaran produk melalui *marketplace* seperti shopee, tokopedia, bukalapak, dsb maupun *marketplace* yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

Pada Bakorwil 2, determinan yang mempengaruhi akses KUR/KUBE/KUB adalah jenis kelamin dan BPUM. Peluang mengakses KUR/KUBE/KUB meningkat pada rumah tangga usaha

mikro yang tidak menerima BPUM. Maka, pemerintah perlu memetakan usaha mikro berdasarkan dampak pandemi terhadap pelaku usaha. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diambil perlakuan yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing usaha mikro. Penerapan skala prioritas dalam pengambilan kebijakan pengembangan usaha dapat dilakukan berdasarkan hasil pendataan yang diperoleh.

Jenis kelamin, penerima BPUM, dan jumlah anggota rumah tangga, secara signifikan berpengaruh pada akses KUR/KUBE/KUB pada Bakorwil 3. Pemerintah setempat dapat menjembatani pasar ekspor bagi rumah tangga usaha mikro di Bakorwil ini. Indikasi potensi pengembangan usaha perlu disambut baik dengan peningkatan permintaan produk usaha mikro rumah tangga. Salah satu contoh upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan promosi produk-produk usaha rumah tangga. Peningkatan promosi dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan promosi pariwisata, promosi produk kriya, serta produk unggulan lain yang berbasis industri mikro rumah tangga. Peranan industri kreatif berskala mikro rumah tangga juga dapat menjadi salah satu peluang peningkatan ekspor dari Bakorwil 3.

Pada bakorwil 4, tidak terdapat determinan yang secara signifikan berpengaruh pada akses KUR/KUBE/KUB. Namun, terhadap akses non-KUR/KUBE/KUB, determinan yang berpengaruh signifikan adalah status pengusaha dan penerimaan BPUM. Pemerintah setempat perlu memprioritaskan pengentasan kemiskinan pada rumah tangga usaha mikro, berdasarkan basis data yang tepat terkait status kesejahteraan masing-masing rumah tangga usaha mikro. Saat persoalan kemiskinan telah teratasi, maka upaya berikutnya adalah strategi mendorong peningkatan produktivitas dan perluasan usaha.

Pada Bakorwil 5, determinan yang signifikan mempengaruhi akses KUR/KUBE/KUB pada rumah tangga usaha mikro yaitu status kemiskinan rumah tangga, jenis lapangan usaha industri, jenis lapangan usaha jasa, jumlah anggota rumah tangga, dan jumlah industri mikro kecil (IMK) di Kabupaten/Kota. Lapangan usaha industri dan jasa menurunkan peluang akses pada KUR/KUBE/KUB pada bakorwil 5 ini. Atau dengan kata lain, peluang pengembangan usaha melalui akses KUR/KUBE/KUB akan cenderung meningkat pada lapangan usaha pertanian. Oleh karena itu, dengan memperhatikan potensi perekonomian yang sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian pada bakorwil ini, maka pemerintah setempat dapat melakukan upaya untuk meningkatkan akses KUR khususnya pada sektor pertanian. Lebih jauh lagi, pemerintah setempat dapat berfokus pada edukasi terhadap para pelaku usaha mikro rumah tangga yang bergerak di sektor pertanian agar dapat meningkatkan kualitas produk hingga produk layak ekspor dan dapat membuka peluang untuk terintegrasi dalam *Global Value Chain (GVC)*.

## Daftar Pustaka

- Abe, M. (2016). SME Participation in Global Value Chains: Challenges and Opportunities. In *Integrating SMEs into Global Value Chains: Challenges and Policy Actions in Asia* (pp. 27–63). ADB Institute.
- Agresti, A. (2012). *Categorical Data Analysis Third Edition*. Wiley.
- Archer, L., Sharma, P., & Su, J.-J. (2020). SME credit constraints and access to informal credit markets in Vietnam. *International Journal of Social Economics*, 47(6), 787–807.
- Ashraf, M. A., & Ibrahim, Y. (2014). Poverty Alleviation and Identifying The Barriers to The Rural Poor Participation in Microfinance: A Case Study in Bangladesh. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 35(3), 99–132.
- Balios, D., Daskalakis, N., Eriotis, N., & Vasiliou, D. (2016). SMEs capital structure determinants

- during severe economic crisis: The case of Greece. *Cogent Economics & Finance*, 4(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2016.1145535>
- BPS. (2021). *Buku 4 Konsep dan Definisi Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas Maret 2021*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021a). *Konsep dan Definisi Podes 2021*.
- BPS. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2022a). *Hasil Survei Kegiatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Provinsi Jawa Timur 2021*.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2022b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2022c). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran 2017-2021*.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2022d). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2017*.
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. (2022). *Hasil Perhitungan Nilai Tambah Koperasi dan UMKM di Jawa Timur Tahun 2021*.
- Esho, E., & Verhoef, G. (2018). The Funding Gap and the Financing of Small and Medium Businesses: An Integrated Literature Review and an Agenda. *Munich Personal RePEc Archive*, 90153, 1–39. [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/90153/1/MPRA\\_paper\\_90153.pdf](https://mpra.ub.uni-muenchen.de/90153/1/MPRA_paper_90153.pdf)[https://pdfs.semanticscholar.org/9ecf/d35c4af416d958b406be35b358862008097a.pdf?\\_ga=2.87441821.426467114.1584066445-1515708840.1579295590](https://pdfs.semanticscholar.org/9ecf/d35c4af416d958b406be35b358862008097a.pdf?_ga=2.87441821.426467114.1584066445-1515708840.1579295590)
- Fongthong, S., & Suriya, K. (2014). Determinants of Borrowers of the Village and Urban Community Fund in Thailand. *ASR Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1). <https://doi.org/10.12982/cmujasr.2014.0002>
- Forte, D., Barros, L. A., & Nakamura, W. T. (2013). Determinants of the capital structure of small and medium sized Brazilian enterprises. *BAR - Brazilian Administration Review*, 10(3), 347–369. <https://doi.org/10.1590/S1807-76922013000300007>
- Gitaharie, B. Y., Soelistianingsih, L., & Djutaharta, T. (2014). *Financial Inclusion: Household Access to Credit in Indonesia*.
- Greene, W. H. (2003). *Econometric Analysis*. Prentice Hall.
- Han, H. (2022). COVID-19 and Global Value Chains. *World Economy Brief*, 12(12).
- Harefa, M. (2015). Masalah Dan Tantangan Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Propinsi Sulawesi Selatan Dan Jawa Tengah. *Kajian*, 20(4), 343–366. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/634>
- Harvie, C., & Charoenrat, T. (2016). SMEs and the Rise of Global Value Chain. In *Integrating SMEs into Global Value Chains: Challenges and Policy Actions in Asia* (pp. 1–22). ADB Institute.
- Heikkilä, A., Kalmi, P., & Ruuskanen, O. P. (2016). Social capital and access to credit: Evidence from Uganda. *The Journal of Development Studies*, 52(9), 1273–1288.

- Hemtanon, W., & Gan, C. (2020). Microfinance Participation in Thailand. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(6), 122. <https://doi.org/10.3390/jrfm13060122>
- Hoque, M. Z., Sultana, N., & Thalil, T. (2016). Credit rationing's determinants of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Chittagong, Bangladesh. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/10.1186/s40497-016-0045-z>
- Hosmer, D. R., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. (2013). *Applied Logistic Regression, Third Edition*. John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/978111854387>
- Hulten, A. Van, & Ahmed, A. D. (2013). Migrant Entrepreneurs' Access To Business Finance In Australia. *Journal of Developmental Entrepreneurship (JDE)*, 18(01), 1–22.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008, (2008).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2016). *Maksud dan tujuan KUR*. <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). *Kementerian PPN*.
- Khanie, G. (2018). *Financing SMEs in Botswana: Factors influencing access to credit* (50).
- Lwesya, F. (2021). SMEs' competitiveness and international trade in the era of Global Value Chains (GVCs) in Tanzania: An assessment and future challenges. *Small Business International Review*, 5(1), e325. <https://doi.org/10.26784/sbir.v5i1.325>
- Maryama, S. (2018). Kendala Usaha Mikro Dalam Mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Liquidity*, 4(1), 64–72. <https://doi.org/10.32546/lq.v4i1.82>
- Myers, S. C. (1984). The Capital Structure Puzzle. *The Journal of Finance*, XXXIX(3), 575–592.
- Nguyen, N., & Luu, N. T. H. (2013). Determinants of financing pattern and access to formal-informal credit: the case of small and medium sized enterprises in Viet Nam. *Journal of Management Research*, 5(2), 240–259.
- Nopitasari, & Handayani, D. (2020). Hubungan Kepadatan Koperasi dan Keputusan Mengakses Pembiayaan Koperasi. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11(2), 149–162.
- OECD. (2017). Strengthening the links between migration, investment, financial services and development. In *Interrelations between Public Policies, Migration and Development* (pp. 155–178). OECD Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9789264265615-8-en>
- Ogoi, H. J. (2017). Strategies for Accessing Credit by Small and Medium Enterprises. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(6), 429–448. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i6/3000>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *KREDIT USAHA*. [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/74#:~:text=Kredit Usaha adalah penyediaan dana,pembayaran bunga dan biaya lainnya.](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/74#:~:text=Kredit%20Usaha%20adalah%20penyediaan%20dana,pembayaran%20bunga%20dan%20biaya%20lainnya.)
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin,

(2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (1998).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, (2008).

Raghu, K., & Trivedi, P. (2019). *Determinants of SME Credit in Mumbai-Empirical Analysis On Factors*. 53(2).

Rodríguez-Pose, A., Ganau, R., Maslauskaitė, K., & Brezzi, M. (2021). Credit constraints, labor productivity, and the role of regional institutions: Evidence from manufacturing firms in Europe. *Journal of Regional Science*, 61(2), 299–328.

Twumasi, M. A., Jiang, Y., Danquah, F. O., Chandio, A. A., & Agbenyo, W. (2019). The role of savings mobilization on access to credit: a case study of smallholder farmers in Ghana. *Agricultural Finance Review*, 80(2), 275–290. [http://www.emeraldinsight.com/10.1108/AFR-05-2019-0055?utm\\_campaign=RePEc&WT.mc\\_id=RePEc](http://www.emeraldinsight.com/10.1108/AFR-05-2019-0055?utm_campaign=RePEc&WT.mc_id=RePEc)

Vutha, H., Shandre, T., & Dionisius, N. (2021). Human Capital and Participation in Global Value Chains: Evidence from SMEs in Indonesia. In *Enhancing SME Participation in Global Value Chain* (1st ed., pp. 131–165). Asian Development Bank Institute.

Wignaraja, G. (2013). Can SMEs Participate in Global Networks? Evidence from ASEAN Firms. In D. K. Elms & P. Low (Eds.), *Global Value Chains in a Changing World* (1st ed., pp. 279–312). WTO, Fung Global Institute, Temasek Foundation Center. <https://doi.org/10.30875/0b68ab34-en>

Yusuf, M. B. O., Shirazi, N. S., & Ghani, G. M. (2013). The impact of Pakistan poverty alleviation fund on poverty in Pakistan: An empirical analysis. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 18(3), 1335–1344.